

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN : SEBUAH STUDI TERHADAP
PNPM-MP DI NAGARI BATU BULEK
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

OLEH :

**LINDA SAFITRA
08 21 21 8005**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMIKINAN : SEBUAH STUDI TERHADAP
PNPM-MP DI NAGARI BATU BULEK KECAMATAN. LINTAU BUO
UTARA**

LINDA SAFITRA
0821218005

Dibawah Bimbingan Prof. Dr.Afrizal,MA, dan Dr.Asmawi,MS

RINGKASAN TESIS

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengarusutamaan gender dalam PNPM-MP dan faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam PNPM-MP. Fokus penelitian ini pada tahapan perencanaan PNPM-MP anggaran 2010. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Guna memahami dan menganalisis persoalan penelitian maka digunakan teori interaksionisme simbolik. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposiv*.. Pengumpulan data didapat melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan perencanaan PNPM-MP tidak terwujud secara maksimal. Karena ditemukan rendahnya keterlibatan perempuan dalam mengemukakan pendapat, saran, dan tingkat kehadiran dalam rapat. Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan juga belum terwakili secara adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan perencanaan PNPM-MP di Nagari Batu Bulek masih rendah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah mendunia, bahkan Negara Amerika Serikat yang terkenal dengan negara yang kuat dalam bidang ekonomi sekalipun, ternyata juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditakuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Walaupun sudah 65 tahun Bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka tetap saja masih dibelenggu oleh kemiskinan yang seakan-akan sulit dipisahkan dari bangsa ini. Masalah kemiskinan yang tidak henti-hentinya melanda negeri ini menuntut peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat untuk segera mengatasinya (Sherraden, 2006 : 13).

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia terdapat di wilayah perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% (23,6 juta jiwa) berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Menurut Sudirja (2007) kemiskinan perdesaan tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan Indonesia.

Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa

Tertinggal (P3DT), Program Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD), Supra Insus, dan Kredit Usaha Tani (KUT),.

Akan tetapi program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan pemerintah tidak efektif membebaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya. Menurut hasil penelitian dari Afrizal dkk, kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah selama ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ; pertama, penyebab yang berkaitan dengan sifat program; kedua, penyebab yang berkaitan dengan pengelolaan program; ketiga, penyebab yang berkaitan dengan partisipasi lembaga dan tokoh-tokoh lokal (Afrizal, dkk 2006 : 106)

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan-kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini sedikit banyak memang disebabkan oleh ketiga faktor tersebut. Salah satu contoh adalah Program Pengembangan Keuangan Mikro yang diberikan kepada petani peladang, petani pesawah dan komunitas miskin lainnya dalam bentuk simpan pinjam yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah tidak bermanfaat untuk jangka panjang, berdasarkan hasil penelitian Afrizal, dkk (2006) kegagalan program ini disebabkan oleh dana simpan pinjam yang dikembangkan dengan bentuk kelompok simpan pinjam tidak bertahan lama. Penyebab utamanya adalah kelompok simpan pinjam yang telah dibentuk tersebut cepat bubar karena sering terjadi kemacetan dalam pengembalian.

Selain ketiga faktor di atas, kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan juga diakibatkan karena pelaksanaan program kurang memperhatikan permasalahan gender. Perlu ditekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan keterlibatan perempuan dalam Tahapan Perencanaan PNPM-MP belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya keterlibatan perempuan baik secara kualitas (berbicara mengemukakan pendapat dan saran) maupun kuantitas (tingkat kehadiran). Peran perempuan dalam organisasi PNPM-MP di Nagari Batu Bulek juga masih sangat rendah dimana dari 27 orang anggota organisasi pelaku-pelaku PNPM-MP di Nagari Batu Bulek, hanya terdiri dari 10 orang perempuan, sementara anggota laki-laki ada 17 orang. Posisi perempuan dalam organisasi tersebut juga cenderung ditempatkan pada posisi-posisi kedua setelah laki-laki. Peran perempuan dalam organisasi masih diidentikan dengan tugas perempuan sehari-hari, misalnya, perempuan diposisikan sebagai bendahara, karena perempuan sudah terbiasa mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Dalam hal pengambilan keputusan, perempuan juga belum terwakili secara adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan perencanaan PNPM-MP di Nagari BatuBulek masih rendah. Berangkat dari pembuat keputusan yang dominan dalam keluarga adalah ayah sebagai kepala keluarga membawa peran tersebut dalam ranah pertemuan PNPM-MP di Nagari. Padahal secara rasional, perempuan juga memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan permasalahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Amir M.S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Afrizal dkk, 2006. *Kemajuan Terkini Penelitian Klaster Sosial-Humaniora*. Yogyakarta: Kantor Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UGM
- Budiman, Arif. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta : PT Gramedia
- Bachtiar, Harsja W. 1984. "Negeri Taram: Masyarakat Desa Minangkabau". Dalam Koentjaraningrat (ed), *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Bainar. 1998. *Wacana Perempuan Dalam KeIndonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen PU.2007. *Buku Pedoman Umum PNPM*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP*. Jakarta
- Diklat Teknis Penyadaran Gender : *Awareness in Decentralization Era*.2008, Modul I : *Konsep dan Teori Gender*
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender Dan Trasformasi Sosial*. Yogyakarta : Putaka Pelajar Offset Ihromi. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Johnson, Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktinya di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Moore, Henrietta . 1988. *Feminism And Antropologi*. Cambridge : Polity Press.
- Murniati dkk. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera.